



GUBERNUR Anwar Hafid menggelar rapat percepatan menuju operasionalisasi perdana Bandara Internasional Mutiara SIS Aljufri di ruang polibu, Rabu (13/8/2025). FOTO: BIRO ADPIM

GUBERNUR SULTENG

## Optimis Bandara Internasional Mutiara SIS Aljufri Jadi Embarkasi Haji

SULTENG RAYA - Gubernur Sulteng, Anwar Hafid mengemukakan bahwa untuk melaksanakan operasional perdana sebagai bandara internasional, maka Bandara Mutiara SIS Aljufri harus mendapatkan sejumlah surat dan rekomendasi teknis dari kementerian/lembaga di pusat.

Penambahan fasilitas penunjang seperti mesin X-RAY, pemisahan ruangan bagi penumpang domestik dan internasional, penambahan panjang landasan pacu hingga 3000 meter dari panjang awal 2500 meter, dan sarana prasarana lain menyangkut karantina,

imigrasi dan bea cukai juga mendesak untuk direalisasikan.

"Kalau kita bisa penuhi, maka bandara internasional ini tetap akan permanen dan tidak akan dicabut (statusnya)," tekan gubernur bahwa hanya diberikan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan

segala administrasi dan fasilitas penunjang bandara.

Agar terwujud, maka Gubernur Anwar Hafid menggelar rapat percepatan menuju operasionalisasi perdana Bandara Internasional Mutiara SIS Aljufri di ruang polibu, Rabu (13/8/2025). Langkah koordinatif

lainnya, juga dipersiapkan Gubernur Anwar Hafid yang akan melakukan audiens dengan Kementerian Perhubungan dan DPR RI terkait tindak lanjut penetapan status internasional Bandara Mutiara SIS Aljufri. Selain itu, dukungan terhadap peningkatan status

Mutiara SIS Aljufri datang dari PT IMIP.

Konkritnya, pihak IMIP siap mengalihkan pintu transit TKA dari Manado ke Mutiara SIS Aljufri Palu sebelum melanjutkan penerbangan ke Morowali.

■ Baca **OPTIMIS**... Hal. 7

### Pemkab Sigi Evaluasi Pelayanan RSUD Tora Belo



Moh Rizal Intjenae

SULTENG RAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah mengevaluasi pelayanan Rumah Sakit Torabelo menyusul adanya dugaan penolakan pasien di ruangan instalasi gawat darurat (IGD).

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae mengatakan sudah menerima laporan terkait dugaan penolakan pasien di Rumah Sakit Tora Belo.

"Saya sudah menginstruksikan seluruh pegawai dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Tora Belo untuk membuat pakta integritas atas pelayanan kesehatan prima dan paripurna," kata dia di Sigi, Rabu.

Ia juga mengaku sudah menegur kepala RS Tora Belo dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi terkait dengan persoalan itu.

"Memang sudah menjadi tugas pemerintah daerah untuk melengkapi beberapa kekurangan sarana prasarana termasuk di Rumah Sakit Tora Belo," ucapnya.

Pihaknya sudah mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan melalui Badan Anggaran DPR RI untuk melengkapi alat dan sarana prasarana

■ Baca **PEMKAB**... Hal. 7

### BLOOD DONATION WEEK

## Wujud Nyata Kepedulian Pertamina di Momen Kemerdekaan



KEGIATAN Blood Donation Week Pertamina. FOTO: DOK PERTAMINA

SULTENG RAYA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyelenggarakan Blood Donation Week seba-

gai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi nyata bagi kemanusiaan. Kegiatan ini berlangsung serentak pada Jumat (8/8) di berbagai titik operasional Pertamina Patra Niaga di Sulawesi, bekerja

sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) setempat.

Mengusung semangat kemerdekaan dan gotong royong, kegiatan ini berhasil mengumpulkan ratusan kantong darah dari para

pekerja dan mitra kerja Pertamina. Donor darah dilakukan secara bertahap di Kantor Unit Makassar, Fuel Terminal, Depot LPG, serta area operasional lainnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga

Regional Sulawesi, Fanda Chrismianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial, sekaligus bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa.

■ Baca **PERTAMINA**... Hal. 7

## BRWA Dukung Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Sulteng

SULTENG RAYA - Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah mendorong atau mendukung perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat di Sulteng.

"Saat ini kami sedang mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk wilayah adat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi," kata Kepala BRWA Sulteng Joisman Tanduru di Palu, Selasa.



BADAN Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah melakukan penguatan masyarakat hukum adat di Sulteng, April 2023. FOTO: ANTARA/DOKUMENTASI PRIBADI

Dia menjelaskan regulasi itu diharapkan mengisi kekosongan aturan di tingkat provinsi, sekaligus menjadi panduan bagi kabupaten untuk membuat regulasi serupa.

Dia menyatakan perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat merupakan mandat UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang menegaskan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan

■ Baca **BRWA**... Hal. 7

## Sulteng Upayakan Bangun Kebun Raya Untuk Pelestarian Hayati



Plt. Kepala Brida Sulteng Hasim R. FOTO: ANTARA/HUMAS PEM-PROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) mengupayakan pembangunan Kebun Raya Sulawesi Tengah sebagai langkah pelestarian keanekaragaman hayati di daerah yang masuk kawasan Wallacea.

Plt. Kepala Brida Sulteng Hasim R di Palu, Selasa, mengatakan pihaknya telah menyampaikan telaahan atau kajian Brida Sulteng kepada Gubernur Sulawesi Tengah terkait pembentukan kebun raya tersebut.

"Alhamdulillah, Bapak Gubernur telah menyetujui pembentukan kebun raya tersebut," katanya.

■ Baca **SULTENG**... Hal. 7

## Warga Serbu Mapolres Poso, Sembako Ludes

**SULTENG RAYA** - Ratusan warga memadati halaman Mapolres Poso untuk mendapat kebutuhan bahan pokok atau sembako di Pasar Murah yang dilaksanakan Polres Poso bekerjasama dengan Bulog Kabupaten Poso, Rabu (13/8/2025).

Kegiatan ini disambut antusias masyarakat, masyarakat menyerbu Mapolres mako Polres Poso, karena berbagai harga kebutuhan pokok yang disediakan lebih murah dibandingkan harga di pasar.

Kapolres Poso AKBP Alowisius Londer, S.I.K., mengatakan kegiatan pasar murah ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke 80 Republik Indonesia, juga sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok di tengah fluktuasi harga.

"Pasar murah ini merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri

kepada masyarakat, untuk meredakan beban warga dan memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau," ujar Kapolres.

Adapun bahan pokok yang dijual di pasar murah, diantaranya beras, gula pasir, minyak goreng Pouch 500 L, minyak pilow 500 L, minyak kemasan 5L serta kebutuhan pokok lainnya yang disediakan langsung oleh Bulog Kabupaten Poso dengan harga subsidi.

Sejumlah warga yang hadir mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. "Harganya lebih murah dari pasar, jadi sangat membantu kebutuhan rumah tangga kami," kata salah seorang warga.

Kegiatan pasar murah ini berlangsung tertib, dengan pengamanan dari personel Polres Poso, sehingga warga dapat berbelanja dengan aman dan nyaman. **AMR**



**SEJUMLAH** warga mengantre untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang dijual dengan harga murah di halaman Mapolres Poso, Rabu (13/8/2025). **FOTO: IST**

## FKUB Sulteng dan MUI Kota Palu Bagikan Bendera

**SULTENG RAYA** - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, turut berpartisipasi melakukan pembagian bendera Merah Putih kepada pengguna Jalan, Rabu (13/8/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Sis Aljufri, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ini dipimpin oleh Ketua FKUB Sulteng Prof. Dr. KH. Zainal Abidin, M.Ag,

bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan masyarakat.

Prof. Zainal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional pembagian sepuluh juta bendera Merah Putih. "Tujuan kami adalah mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut dan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dengan penuh semangat dan kebanggaan," ujarnya.

Melalui acara ini kata Prof. Zainal diharapkan

masyarakat semakin termotivasi untuk mengibarkan bendera Merah Putih di depan rumah atau kendaraan mereka, sebagai wujud kecintaan terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik.

"Cinta tanah air dalam Islam, atau hubb al-wathan minal iman, adalah bagian dari iman dan merupakan kewajiban agama. Ungkapan ini menegaskan bahwa mencintai tanah air adalah tindakan yang terpuji dan sejalan dengan ajaran Islam," ujarnya. **AMR**



**KETUA** FKUB Sulteng, Prof. Dr. KH. Zainal Abidin bersama beberapa pihak, saat berpartisipasi membagikan bendera merah putih kepada pengendara yang melintas di Jalan Sis Aljufri, Kecamatan Palu Barat, Rabu (13/8/2025). **FOTO: IST**



**WALI** Kota Palu, Imelda Lilianna Muhidin mendampingi Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, saat bertemu dengan pihak Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Rabu (13/8/2025). **FOTO: IST**

## Pemkot Bebaskan Lahan, Dukung Peningkatan Status Bandara

**SULTENG RAYA** - Wakil Wali (Wawali) Kota Palu, Imelda Lilianna Muhidin menghadiri rapat koordinasi bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan sejumlah pihak terkait lainnya, Rabu (13/8/2025) di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Rapat tersebut membahas tindak lanjut peningkatan status Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu menjadi bandara internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025.

Dengan status baru ini, bandara kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah tersebut kini memiliki kewenangan melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri,

baik untuk penerbangan charter maupun penerbangan reguler.

Imelda menegaskan Pemerintah Kota Palu siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dalam hal kesiapan lahan untuk mendukung peningkatan kapasitas landasan pacu bandara.

"Untuk Kota Palu, pastinya lahan yang jadi kesiapan. Kita akan lihat taksiran harga lahan, karena diperkirakan sampai ujung Petobo," ungkap Wawali.

Selain lahan, Pemkot Palu juga akan memaksimalkan fasilitas pendukung seperti hotel dan akomodasi wisata lainnya.

"Hotel Mercure itu, Insya Allah, akan hadir kembali. Satu hotel sementara pembangunan, dan sisanya

akan kita maksimalkan," tambah Imelda. Menurut Imelda, peningkatan status Bandara Mutiara Sis Aljufri menjadi bandara internasional akan membuka peluang besar bagi Kota Palu untuk menggelar berbagai event berskala nasional hingga internasional.

"Kita upayakan maksimal agar Kota Palu menjadi destinasi wisata dunia internasional untuk segala event," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu optimistis, langkah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan konektivitas daerah, sekaligus menjadikan Palu sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan timur. **ABS**



**POLISI** menyita barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan tembakau sintesis dari tangan dua orang pria yang ditangkap di tempat berbeda, Selasa (12/8/2025). **FOTO: IST**

## Dua Pengedar Ganja dan Tembakau Sintetis Diringkus

**SULTENG RAYA** - Satuan Reserse Narkotika Polresta Palu berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja dan jenis tembakau sintesis di wilayah Kota Palu. Dua orang pelaku ditangkap di tempat yang berbeda, pria berinisial AG (21) ditangkap atas kepemilikan paket ganja seberat 45,1 gram (bruto), sementara pelaku lainnya berinisial FW (27) atas kepemilikan tembakau sintesis sebanyak 24 paket seberat 12,77 gram (bruto).

AG (21) merupakan warga Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong. Penangkapan terjadi pada Selasa (12/8/2025) sekira pukul 14.00 Wita di sebuah kos-kosan di Jalan Tombolotutu, Lorong Delima, Kelurahan Talise.

"Dari tangan pelaku AG, juga diamankan satu unit timbangan digital, sembilan plastik klip kosong, satu unit ponsel, dan satu kotak plastik," ujar Kapolresta Palu, Kombes Pol Deny Abrahams.

Kapolresta mengungkapkan, dari keterangan pelaku AG, ganja tersebut diperoleh pelaku dari seseorang berinisial IC yang berada di wilayah Ampibabo, untuk dikonsumsi dan diedarkan kembali.

"Pelaku mengakui mendapatkan ganja dari seorang pemasok di luar Kota Palu, dan sebagian untuk dijual kembali," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Deny untuk pengungkapan kasus narkotika jenis tembakau sintesis bermula dari informasi masyarakat bahwa pria FW (27) diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintesis di wilayah Kota Palu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsional Satresnarkotika melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap pelaku di Jalan Simpotove Timur (Huntap), Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 24 paket narkotika jenis tembakau sintesis seberat brutto 12,77 gram, dua lembar plastik klip kosong, satu unit handphone warna biru, dan satu buah tas samping warna hitam abu-abu.

"Informasi yang kami terima langsung ditindaklanjuti oleh tim opsional, hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti," ujarnya.

"Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku memesan tembakau sintesis secara online. Modus ini memang



sedang marak, sehingga masyarakat kamiimbau waspada dan tidak terjebak," tambahnya.

Kapolresta Palu menegaskan, pihaknya akan terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya, dan atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Keduanya kini ditahan di Mapolresta Palu untuk proses hukum lebih lanjut," tutup kapolresta. **AMR**

MERIAHKAN HUT KEMERDEKAAN RI KE-80

# Hari Ini, Kantor Imigrasi Palu Buka Layanan Paspor Merdeka di Lapangan Walikota



PETUGAS Imigrasi Palu saat melayani warga yang mengurus Paspor Merdeka di kawasan CFD Vatulemo, Ahad (10/8/2025). FOTO: HUMAS KANTOR IMIGRASI PALU

**SULTENG RAYA** - Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-80, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu kembali

membuka pelayanan Paspor Merdeka di lapangan Walikota Palu pada hari ini Kamis (14/8/2025).

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I TPI Palu,

Pungki Handoyo menyebutkan, sebelumnya pelayanan Paspor Merdeka pertama kali digelar pada tanggal 10 Agustus 2025 di kawasan Car Free Day (CFD) Vatu-

lemo Kota Palu, selanjutnya yang kedua kalinya telah digelar pada tanggal 11 Agustus 2025 di Kantor Kejaksaan Negeri Palu, dan ketigalinya layanan tersebut dibuka di

Mako Polresta Palu pada tanggal 12 Agustus 2025, serta rencananya besok (hari ini) pada Kamis tanggal 14 Agustus 2025 akan dibuka di lapangan Walikota Palu yang dimulai pukul 09.00 wita hingga pukul 14.00 wita. Lanjut Kakanim menyebutkan, sejumlah syarat yang harus dilengkapi dan berkas yang harus dibawa ke tempat layanan Paspor Merdeka diantaranya, syaratnya yang pertama wajib mendaftar melalui situs <http://139.255.53.179/perdimonlineimigrasipalu>, dan selanjutnya datang dengan membawa perlengkapan berkas sesuai dengan tanggal yang dipilih.

"Untuk pelayanan Paspor Merdeka ini hanya melayani pembuatan baru dan penggantian paspor elektronik. Sementara, untuk persyaratan berkas yang harus dibawa yaitu KTP (salinan dan asli), KK/ijazah/bukuh nikah/akta lahir/surat baptis (salinan dan asli) dan membawa paspor

lama (untuk penggantian), utuk informasi lebih lanjut hubungi contact service 081341348008," sebut Kakanim Palu, Pungki Handoyo, Selasa (12/8/2025).

Menurut Pungki, kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan paspor kepada masyarakat sekaligus memberikan kemudahan bagi pemohon yang ingin mengurus dokumen keimigrasian di akhir pekan.

"Untuk jumlah kuota pembuatan Paspor Indonesia Merdeka sebanyak 80. Pelayanan dimulai sejak pukul 06.00 hingga 09.00 wita. Masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pengurusan paspor baru maupun penggantian, tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi pada hari kerja," tuturnya.

Pungki Handoyo, menyampaikan bahwa Layanan Paspor Merdeka merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang sejalan dengan semangat kemerdekaan.

"Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, salah satunya dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan kami terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi tentang prosedur dan persyaratan permohonan paspor yang benar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait layanan keimigrasian.

Dengan suksesnya pelaksanaan Layanan Paspor Merdeka ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan pelayanan di berbagai momen dan lokasi strategis demi memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat. **YAT**

## KPPBC Tipe Madya Pabean C Luwuk Musnahkan Barang Milik Negara



PEMUSNAHAN Barang Menjadi Milik Negara (BMMN) Hasil Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Luwuk, Pemkab Banggai, di kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Luwuk, Selasa (12/8/2025). FOTO: DOK PEMKAB BANGGAI

**SULTENG RAYA** - Bupati Banggai diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banggai, Hj. Nur Djajal, menghadiri pemusnahan Barang Menjadi Milik Negara (BMMN) Hasil Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Luwuk, Pemkab Banggai, di kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Luwuk, Selasa (12/8/2025).

Pemusnahan barang-barang tersebut, berasal dari pelanggaran kepabeanaan dan cukai, yang telah melalui proses hukum hingga berstatus sah sebagai milik negara. Tujuannya untuk menegakkan peraturan, dan juga mencegah barang-barang tersebut kembali beredar di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Nur

Djalal menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai mendukung penuh langkah Bea Cukai Luwuk bersama aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran barang ilegal.

"Pemkab Banggai akan terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait agar barang-barang yang melanggar ketentuan hukum tidak beredar di tengah masyarakat," terang Nur Djajal.

Sementara, Kepala Bea Cukai Luwuk, Mu'amar Khadafi menyampaikan, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah kegiatan operasi bersama dalam rangka penegakan hukum atas peredaran rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal.

"Bea Cukai Luwuk bersinergi dengan Pemkab Bang-

gai, Banggai Kepulauan (Bangkep), Banggai Laut (Balut), Tojo Una-Una (Touna) dan aparat penegak hukum terkait, dalam melaksanakan operasi bersama untuk mengamankan hak-hak keuangan negara atas Barang Kena Cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menjalankan fungsi sebagai pelindung masyarakat dari peredaran barang-barang yang berbahaya untuk kesehatan," tutur Mu'amar.

Ia menjelaskan, rokok dan MMEA ilegal yang dimusnahkan merupakan BMMN hasil penindakan KPPBC Tipe Madya Pabean C Luwuk.

"Sebanyak 322.000 batang rokok dan 11,34 liter MMEA dengan total nilai barang mencapai Rp479.370.000, dan potensi kerugian negara

mencapai Rp240.212.000," ujarnya.

Menurutnya, penindakan tersebut menghasilkan denda sebesar Rp278.137.000, yang merupakan hasil dari extra effort Bea Cukai Luwuk dalam mengamankan penerimaan negara.

Ia menyebut, pemusnahan BMMN tersebut mencerminkan komitmen bersama antara instansi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

"Sinergi antara Bea Cukai, TNI, Polri, dan Pemkab Banggai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pengawasan di wilayah ini, khususnya terhadap peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan," jelasnya.

Selain sebagai tindakan penegakan hukum lanjutnya, pemusnahan BMMN juga menjadi pesan moral bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan barang, memastikan legalitas serta keamanannya.

Mu'amar menegaskan, Bea Cukai Luwuk dalam pengawasan akan terus ditingkatkan, termasuk dengan memperluas koordinasi lintas instansi guna menekan praktik peredaran barang ilegal di Kabupaten Banggai dan sekitarnya. **YMAN**

TERAPKAN AMANAT UU PEMASYARAKATAN

## LPKA Palu Lakukan Skrining Rehabilitasi Bagi Anak Binaan



SUASANA skrining rehabilitasi anak binaan LPKA Palu, Kamis (7/8/2025). FOTO: HUMAS LPKA PALU

**SULTENG RAYA** - Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), LPKA Kelas II Palu melaksanakan skrining menyeluruh terhadap Anak Binaan pada Kamis (7/8/2025).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, guna memastikan ketersediaan layanan rehabilitasi bagi seluruh Anak Binaan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Salah satu Perawat LPKA Palu, Lise, menjelaskan bahwa skrining ini adalah langkah awal yang sangat krusial. "Tujuan dari skrining ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi awal Anak Binaan, baik dari sisi fisik maupun mental, yang mana hal tersebut menjadi dasar penentuan program rehabilitasi yang paling tepat," ujar Lise.

Ia menambahkan, setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang per-

sonal sangat diperlukan. Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa perawatan merupakan salah satu dari enam fungsi Pemasyarakatan. Pasal 60 ayat (1) secara spesifik menyebutkan bahwa Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA berkewajiban memberikan perawatan kepada Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab.

Kepala LPKA Palu, Mohammad Kafi, menegaskan komitmen lembaganya dalam menjalankan tugas tersebut. "Skrining ini bukan sekadar formalitas. Kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan rehabilitasi yang efektif dan terukur. Harapannya, melalui program rehabilitasi yang tepat sasaran, Anak Binaan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan mental yang lebih baik," jelas Kafi.

Dukungan penuh datang dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan LPKA Palu.

"Optimalisasi rehabilitasi di LPKA adalah prioritas. Sesuai instruksi dari pusat, kami memastikan setiap Rutan, Lapas, dan LPKA di Sulawesi Tengah dapat menyediakan layanan rehabilitasi yang memadai. Skrining yang dilakukan LPKA Palu ini adalah contoh nyata bagaimana amanat undang-undang diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan," kata Bagus.

Kegiatan skrining ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemeriksaan kesehatan dasar, wawancara psikososial, hingga observasi perilaku. Data yang terkumpul akan menjadi landasan bagi tim medis dan pembinaan untuk menyusun program rehabilitasi yang komprehensif, mencakup aspek pendidikan, keterampilan, spiritual, dan mental. Dengan demikian, diharapkan layanan rehabilitasi di LPKA Palu bisa berjalan optimal, sejalan dengan tujuan mulia Undang-Undang Pemasyarakatan. **YAT**

# India Boikot McDonald's Hingga Coca-Cola Indonesia Harus Buat Undang-Undang Ekonomi Syariah



FOTO: IST

SULTENG RAYA - Dari McDonald's dan Coca-Cola hingga Amazon dan Apple, perusahaan multinasional asal Amerika Serikat menghadapi seruan boikot di India. Para eksekutif bisnis dan pendukung Perdana Menteri Narendra Modi mengobarkan sentimen anti-AS sebagai bentuk protes terhadap tarif yang diberlakukan Washington.

India, negara dengan populasi terbesar di dunia, merupakan pasar utama bagi merek-merek Amerika yang berkembang pesat membidik konsumen kaya yang terus bertambah. Bagi sebagian besar konsumen, merek internasional masih dianggap sebagai simbol peningkatan kualitas hidup.

India, misalnya, menjadi pasar terbesar bagi pengguna WhatsApp milik Meta. Domino's memiliki lebih banyak gerai di India dibandingkan negara lain. Minuman seperti Pepsi dan Coca-Cola kerap mendominasi rak toko, dan masyarakat masih mengantre ketika gerai Apple baru dibuka atau kafe Starbucks menawarkan diskon.

Meski belum ada indikasi langsung penjualan akan terdampak, seruan di media sosial untuk membeli produk lokal dan meninggalkan produk Amerika kian menguat. Hal ini dipicu langkah

Donald Trump yang membebankan tarif 50 persen atas barang dari India, yang mengganggu eksportir dan merenggankan hubungan New Delhi-Washington.

McDonald's, Coca-Cola, Amazon, dan Apple belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Manish Chowdhary, salah satu pendiri Wow Skin Science di India, mengunggah video di LinkedIn yang mengajak masyarakat mendukung petani dan perusahaan rintisan demi menjadikan "Buatannya India" sebagai "obsesi global".

Ia mengajak belajar dari Korea Selatan yang sukses menjadikan produk makanan dan kecantikannya terkenal di dunia.

"Kita telah mengantre untuk mendapatkan produk dari ribuan mil jauhnya. Kita dengan bangga menghabiskan uang untuk merek yang bukan milik kita, sementara produsen kita sendiri berjuang mendapatkan perhatian di negara mereka sendiri," ujarnya. "India seharusnya memiliki Twitter, Google, YouTube, WhatsApp, dan Facebook buatan dalam negeri seperti yang dimiliki China," kata Rahm Shastri, CEO DriveU India penyedia layanan panggilan penumpang mobil menulis di LinkedInnya.

Faktanya, sejumlah ritel

India mampu bersaing ketat dengan merek asing seperti Starbucks di pasar domestik. Namun, menembus pasar global menjadi tantangan tersendiri. Sementara itu, perusahaan jasa teknologi informasi India telah mengakar kuat di ekonomi global. Perusahaan seperti Tata Consultancy Services (TCS) dan Infosys menyediakan solusi perangkat lunak bagi klien di seluruh dunia.

Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghukum negara-negara lain yang masih membeli minyak dari Rusia setelah ia memberlakukan tarif impor tambahan terhadap India. "Anda akan melihat semakin banyak sanksi sekunder," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 25 persen terhadap India karena negara itu masih membeli minyak dari Rusia. Tarif tambahan tersebut akan berlaku dalam 21 hari.

Perintah tersebut juga memuat instruksi kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Keuangan Scott Bessent untuk mengidentifikasi negara-negara lain yang mengimpor minyak dari Rusia baik "secara langsung atau tidak".

Menurut peraturan yang diteken Trump itu, jika Menteri Perdagangan mendapati sebuah negara masih mengimpor minyak dari Rusia, maka Menteri harus menyarankan langkah yang perlu diambil Presiden terhadap negara itu, dengan nasihat dari pejabat terkait.

"Termasuk apakah perlu menjatuhkan tarif bea ad valorem tambahan sebesar 25 persen terhadap barang-barang yang diimpor dari negara tersebut," menurut perintah eksekutif itu.

Trump mengatakan pihaknya akan mengambil keputusan terkait sanksi terhadap negara-negara yang membeli minyak dari Rusia setelah pembicaraan antara Duta Khusus AS Steve Witkoff dan pejabat Rusia di Moskow. Presiden AS menuduh New Delhi meraup keuntungan besar dari menjual ulang minyak produksi Rusia.

Merespons keputusan itu, India "amat menyayangkan" Trump menaikkan tarif hingga 50 persen untuk produk India atas "tindakan yang juga diambil beberapa negara lain demi kepentingan nasionalnya."

Kementerian Luar Negeri India menyebut langkah tersebut "tak adil, tak dapat dibenarkan, dan tak masuk akal". New Delhi juga menyatakan akan "mengambil semua langkah yang diperlukan" untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

RPB

# Indonesia Harus Buat Undang-Undang Ekonomi Syariah

SULTENG RAYA - Tokoh ekonomi syariah yang juga mantan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin mendorong pemerintah untuk membuat Undang-Undang (UU) Ekonomi Syariah. Dengan adanya regulasi komprehensif terkait ekonomi syariah, ia meyakini ekosistem ekonomi dan keuangan syariah akan semakin luas serta menjadi arus baru ekonomi Indonesia yang kian berkembang.



Ma'ruf Amin

yang hadir langsung.

"Saya kira Bu Sri, kita harus membuat Undang-Undang Ekonomi Syariah yang komprehensif," ujar Ma'ruf.

Ia menekankan, dengan adanya UU Ekonomi Syariah, peraturan terkait ekonomi syariah tidak lagi terpisah-pisah. Saat ini sudah ada UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pengaturan asuransi syariah yang masuk dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peralusuran.

"Jadi, Undang-Undang Ekonomi Syariah nanti masuk di mana saja, semua diinfiltrasi. Saya tinggal mengantarkan, Bu Sri itu kita masukkan semua," ujarnya. Ma'ruf melanjutkan, ia su-

dah berkomunikasi dengan DPR RI, tepatnya Komisi XI, terkait dorongan pembentukan UU Ekonomi Syariah.

"Kemarin saya bicara dengan Ketua Komisi XI Pak Misbakhun, katanya DPR akan menginisiasi tentang Undang-Undang ini," ungkapnya.

Ia menilai, ide tersebut mestinya tinggal direalisasikan. Dengan begitu, ia berharap UU Ekonomi Syariah dapat segera terbentuk.

"Bu Sri sudah ada di sini, saya sudah bicara dengan Pak Misbakhun. Jadi saya kira tinggal ketok saja. Undang-Undang Ekonomi Syariah nanti meliputi semua aspek," tegasnya, kembali menyebut Sri Mulyani. RPB

## Wapres Gibran Bertandang ke Kediaman Jenderal Try Sutrisno



WAKIL Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Wapres ke-6 RI Jenderal (Purn) Try Sutrisno di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025). FOTO: SETWAPRES

SULTENG RAYA - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Wapres ke-6 RI Jenderal (Purn) Try Sutrisno di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025). Selain silaturahmi, kunjungan itu menjadi wujud nyata pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya.

Termasuk membangun komunikasi yang erat dengan para senior, demi memperkuat kesinambungan kepemimpinan nasional. Hal itu dilakukan menjelang peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025. Dalam suasana pertemuan yang hangat dan penuh rasa hormat, Gibran disambut langsung oleh Try Sutrisno dan Ibu Tuti Try Sutrisno. Putri pertama Try, Nora Tristiana juga ikut dalam pertemuan tersebut. "Diskusi yang terjalin berlangsung dinamis, membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global," demikian keterangan pers Setwapres. Pada kesempatan itu, Try Sutrisno memberikan wejangan berharga terkait

pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Pertemuan itu turut menjadi momen bagi Wapres untuk menyampaikan undangan Peringatan HUT RI ke-80, yang diterima dengan penuh perhatian.

Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan dapat semakin mempererat jalinan silaturahmi antar generasi pemimpin bangsa, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mengawal agenda strategis pembangunan nasional. "Kehadiran Wapres Gibran di kediaman Bapak Try Sutrisno mencerminkan sikap menghargai jasa para pendahulu serta komitmen untuk terus berdialog demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat," begitu kata Setwapres. RPB

SULTENG RAYA - Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ikhwan, mengatakan International Sustainability Forum (ISF) 2025 yang akan digelar pada Oktober mendatang menjadi momentum penting untuk membangun strategi baru menarik investasi ke Indonesia, khususnya di sektor berkelanjutan.

Menurut Nurul, sebelum 2024 strategi investasi Indonesia cenderung seperti "tangan di bawah" saat mencari investor. "Kita selalu bilang ayo investasi di Indonesia, bawa teknologi, bawa modal, bawa akses terhadap pasar global. Tapi namanya investor itu pasti intinya mencari keuntungan. Karena investment is not charity, ini bukan sedekah, bukan amal jariah, ini bisnis.

Jadi dia harus cari keuntungan," ujar Nurul saat konferensi pers Kickoff Meeting and Media Briefing Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Ia menambahkan, keuntungan bagi investor kini semakin terkait dengan kesadaran pasar terhadap produk ramah lingkungan. Pasar global, kata dia, mulai menghargai barang yang sedikit lebih mahal tetapi memiliki nilai proteksi terhadap lingkungan.

"Kita jangan berpikir kalau Indonesia bisa memproduksi barang murah, tapi kemudian ada persoalan orang utan, pekerja di bawah umur, atau listrik dari batubara. Itu selalu jadi kampanye negatif terhadap iklim investasi kita," sambung Nurul.

Ia mengingatkan, laporan World Economic Forum menempatkan faktor lingkungan sebagai salah

## BKPM Tegaskan Investasi Bukan Amal Jariah



PEMERINTAH berkomitmen agar investasi yang masuk benar-benar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. (ilustrasi). FOTO: DOK REP

satu risiko ekonomi terbesar di masa depan. Hal ini mendorong pemerintah dan pelaku usaha menyesuaikan strategi bisnisnya. "Yang kita lakukan adalah peningkatan komprehensif, misalnya mengedepankan peran untuk mengurangi emisi karbon, bahkan menjadikan Indonesia pusat carbon capture, storage, and utilization," ujarnya.

Nurul menyebut regulasi dan undang-undang terkait sudah tersedia, namun pemerintah masih menunggu proses pemberian insentif bagi bisnis yang bergerak di bidang tersebut. Ia menekankan, transisi energi tetap menjadi fokus, termasuk penggunaan batubara yang emisinya dapat ditangkap dan disimpan agar tidak mencemari atmosfer.

Selain itu, Nurul juga menyoroti peran Danantara sebagai kekuatan baru dalam ekosistem investasi hijau.

"Ketika ada industri yang berhubungan dengan ekosistem baterai, Danantara menyiapkan skema investasi hijau di sektor tersebut. Tahun ini saja sekitar 7-8 miliar dolar AS harus diinvestasikan," ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto mendorong penyatuan energi dan sumber daya untuk menghasilkan program konkret dan signifikan. "Energi itu disatukan lewat Danantara dan sinkronisasi program pemerintah, supaya investasi yang masuk benar-benar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan," kata Nurul. RPB

Untuk yang berlangganan rental MOBIL LORENNA akan mendapatkan FREE MINERAL WATER & SNACK 7x Keberangkatan Palu-Tallo gratis 1 tiket

**LORENNA**  
TRAVEL AGENT & EXPOSITION

Toko Sempurna Baru  
Jl. Syarif Mansur No.111  
Tallo  
Telp/WA: 0812 3333 2318

Cabang Palu:  
Jl. Juanda No. 78  
Telp: 0813 4124 2003  
WA: 0852 3255 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

BIRO PERJALANAN UMUM  
**PRIMA JAYA TRAVEL**

PALU - POSO - TENTENA  
BUNGKU - KENDARI

PALU: Jl. Hangtuha No. 40 Telp.: 082396625339

BUNGKU (MOROWALI): Jl. Trans Sulawesi (Depan RSJ/D Morowali) Telp.: 085394573024

KENDARI: Terminal Puwatu Telp.: 082342677110

BIRO PERJALANAN UMUM  
**CV MITRATOUNA TRAVEL/BIS**  
PALU-AMPANA

AGEN PERWAKILAN:

PALU : Jl. Tombolotutu No.50-52  
Telp : (0451) 424347 - 4704707 - 427139

AMPANA : Jl. Tanjungbulu Bawah No. 9 (Dekat Tugu Ampana)  
Telp : 081252984112, 081252984116  
081243799363, 082122150777

# Masyarakat Harus Terima Hitung Cepat dan Hasil PSU Pilkada

PEMUNGUTAN Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Papua dan Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2025 menjadi momen penting dalam menjaga kemurnian demokrasi di wilayah tersebut. Pelaksanaan PSU ini bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga menjadi ujian kedewasaan politik bagi seluruh pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Dengan proses yang telah diawasi secara ketat oleh berbagai pihak, hasilnya selayaknya diterima dengan lapang dada demi kepastian hukum dan stabilitas daerah.

OLEH : ROBERT DANIS \*)

**K**ETUA DPP PDIP Bidang Hukum dan Advokasi Ronny Talapessy menegaskan bahwa semua pihak yang berkontestasi harus menerima hasil PSU secara adil dan jujur, tanpa ada tindakan yang mencederai hak politik rakyat. Ia menyoroti adanya indikasi upaya mengubah hasil perolehan suara melalui pleno berjenjang serta dugaan intimidasi terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan aparat pengawas pemilu. Menurutnya, praktik-praktik yang berpotensi merusak proses demokrasi harus dihentikan, karena intervensi terhadap kehendak rakyat hanya akan memperlebar potensi konflik.

Berdasarkan hasil hitung cepat Poltracking Indonesia, pasangan calon Benhur Tomi Mano-Constant Karma ung-

gul tipis dengan perolehan 50,85 persen suara, disusul pasangan Matius Fakhiri-Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dengan 49,15 persen. Quick count ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dan memiliki margin of error  $\pm 1,0$  persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Data tersebut menjadi gambaran awal preferensi pemilih dan seharusnya menjadi rujukan awal bagi semua pihak untuk mempersiapkan diri menerima hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu, dari perspektif pemerintah pusat, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa PSU kali ini diharapkan menjadi yang terakhir di Papua. Menurutnya, Papua adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih me-

laksanakan PSU, sehingga menjadi penting untuk memastikan proses ini benar-benar final dan tidak perlu diulang kembali. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pemungutan suara, karena keberhasilan ini akan menjadi modal penting dalam memperkuat demokrasi lokal.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, berlangsung lancar dan tertib. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemendagri) turut mengambil peran aktif dalam mengawal pelaksanaan PSU. Dua tim khusus diterjunkan untuk memantau langsung jalannya proses di lapangan. Tim pertama yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Mohammad K. Koba, memantau 25 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Mandobo, termasuk lokasi pencoblosan para calon kepala daerah. Hasil pemantauan menunjukkan situasi kondusif, antrean pemilih tertib, dan tidak ada penumpukan massa yang mengancam dukungan terhadap pasangan calon tertentu.

Tim kedua yang dipimpin Staf Khusus Menko Polkam, Teddy Mantoro, juga melakukan pemantauan di sejumlah TPS strategis, termasuk di Lapas Kelas III Tanah Merah yang memiliki TPS khusus. Di lokasi tersebut, pencoblosan berlangsung tertib

dengan pengamanan ketat, sehingga seluruh pemilih terdaftar dapat menyalurkan hak suaranya dengan bebas dan aman. Kehadiran tim pemantauan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh menjaga integritas PSU, bekerja sama dengan KPUD, Bawaslu, aparat keamanan, dan pemerintah daerah.

Dengan adanya pengawasan ketat, proses pemungutan suara yang tertib, serta transparansi hasil quick count, tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk menolak hasil akhir PSU yang nantinya akan diumumkan oleh KPU. Menerima hasil pemilu, meskipun berbeda dengan harapan, adalah bagian dari etika demokrasi yang sehat. Penolakan tanpa dasar yang jelas hanya akan memperparah ketegangan, mengganggu stabilitas, dan merugikan masyarakat luas.

Kedewasaan politik harus menjadi pegangan semua pihak dalam menyikapi hasil PSU. Pemenang hendaknya tidak jumawa, sementara pihak yang kalah harus legawa, menyiapkan langkah konstruktif ke depan. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang, tidak terprovokasi isu yang belum terverifikasi, dan menunggu hasil resmi KPU sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pemenang.

Pilkada sejatinya adalah sarana untuk memilih pemimpin terbaik bagi daerah, bukan ajang memperuncing

perbedaan. Ketika semua pihak bersedia menghormati proses dan hasil, maka yang tercipta adalah suasana kondusif yang memungkinkan pemerintahan daerah terpilih bekerja optimal. Sebaliknya, jika hasil terus dipersoalkan tanpa dasar hukum yang kuat, maka energi yang seharusnya digunakan untuk membangun daerah justru habis untuk konflik berkepanjangan.

Momentum PSU kali ini menjadi kesempatan bagi Papua untuk menunjukkan bahwa demokrasi dapat berjalan dengan tertib, damai, dan bermartabat. Integritas penyelenggara, kedewasaan pemilih, serta komitmen aparat dan elite politik untuk menghormati hasil menjadi kunci keberhasilan proses ini. Pada akhirnya, menerima hasil quick count sebagai gambaran awal, dan mengakui hasil resmi KPU sebagai keputusan final, adalah langkah penting untuk menutup tahapan pilkada dengan baik dan memulai babak baru pembangunan daerah.

Dengan demikian, seluruh pihak di Papua dan Papua Selatan seharusnya dapat menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Menghormati suara rakyat berarti menjaga stabilitas politik, memperkuat demokrasi, dan memberi kesempatan kepada pemimpin terpilih untuk segera bekerja mewujudkan janji-janji kampanye demi kemajuan daerah. \*)

Penulis adalah Pengamat Politik

## TAJUK



## Perbaiki Tata Kelola Haji

MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak lagi menjadi institusi yang memimpin dan melaksanakan misi haji jemaah asal Indonesia. Ada lembaga baru, yakni Badan Penyelenggara (BP) Haji, yang akan menggantikan peran Kemenag yang telah 75 tahun melayani jemaah haji.

Kini, harapan pengelolaan haji yang amanah, profesional, dan beres berada di pundak Mochammad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak yang dipercaya untuk memimpin BP Haji yang dibentuk pada 20 Oktober 2024 itu. Harapan tersebut terutama beres agar era baru penyelenggaraan ibadah haji tidak sekadar wadah atau lembaga dan orang-orang yang anyar, tapi harus ada penerusan pengelolaan dan pemberesan hal-hal yang masih kacau.

Sebagai lembaga yang fokus mengurus layanan ibadah haji, BP Haji tentu diharapkan bisa menghasilkan pengelolaan yang lebih mumpuni. Itu akan terbukti jika persoalan menahun yang muncul, yakni perencanaan kuota hingga persoalan teknis di penyelenggaraan, seperti layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi, bisa dibereskan.

Selain itu, BP Haji harus bisa menciptakan sistem pengelolaan ibadah haji yang profesional dan modern, khususnya dari sisi keuangan, dengan mengedepankan prinsip good governance. Lakukan audit secara berkala. Berikan kepada publik transparansi pengelolaan dana haji sehingga akuntabilitasnya terjaga serta bagian kemanfaatan lebih bagi jemaah.

Jangan ada lagi praktik mengotak-atik dana yang seharusnya menjadi hak jemaah. Biarkan hak jemaah menjadi milik jemaah. Hentikan perilaku menyimpang sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Biarlah itu menjadi sejarah kelam yang jangan diulang lagi.

Kita masih ingat saat Said Agil Husin Al Munawar divonis bersalah lantaran menyalahgunakan dana abadi umat dan dana penyelenggaraan ibadah haji selama menjadi menteri agama periode 2001-2004. Jangan pula mengulangi peristiwa ketika Suryadharma Ali sebagai menteri agama periode 2009-2014 harus menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan lantaran korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan penyalahgunaan dana operasional menteri. Suryadharma termasuk orang-orang dekatnya, termasuk sopirnya dan sopir istrinya, untuk bisa menunaikan ibadah haji gratis dan menjadi petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Dan, kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerbitkan surat perintah penyidikan terkait dengan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024. Meski belum mengumumkan tersangka, KPK telah menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024 itu mencapai lebih dari Rp1 triliun. Dalam kasus ini, bekas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Publik berharap semua itu menjadi cerita terakhir. Jadikan penyelenggaraan haji mulai 2026 sebagai pelayanan bagi proses peribadatan yang paripurna tanpa celah, apalagi masalah. Calon jemaah mesti bisa mendapat kepastian keberangkatan menunaikan ibadah tanpa هنگi pengki soal kuota haji. Jemaah juga mesti digaransi bisa menjalani ibadah dengan nyaman karena semua kebutuhan terpenuhi sesuai hak tanpa ada yang dikurang-kurangi.

Hasilnya, seluruh jemaah dan penyelenggaraannya bisa kembali ke Tanah Air tanpa ada yang harus dibawa ke KPK atau penegak hukum lain lantaran terdapat maksud-maksud terselubung dan aksi culas lainnya. \*Media Indonesia

## ENERGI KOLEKTIF UNTUK NEGERI

# Ketua Panitia Tanwir IMM 2025

INDONESIA dengan jumlah penduduk ke tiga terbesar di dunia, sesungguhnya bukan negara kaya dengan sumber migas. Cadangan yang dimilikinya hanya 3,3 giga barel minyak, atau setara dengan 0,2% cadangan minyak dunia. Bandingkan dengan Venezuela yang memiliki 300,9 giga barel cadangan minyak menempati posisi teratas cadangan minyak dunia.

OLEH : EDDY SUPRAPTO

**I**KATAN Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang akan berlangsung di Malang, 28-31 Oktober 2025 mendatang. Kegiatan nasional ini akan membawa tajuk "Energi Kolektif untuk Negeri". Inilah forum terbaik bagi IMM untuk berhenti sejenak, sembari menimbang arah dan makna IMM di masa depan.

Pemilihan waktu dan tema tanwir ini jelas bukanlah persoalan administrasi belaka, melainkan hasil penggalan filosofis dan sosiologis. Ketua Umum DPP IMM, Riyan Betra Delza, sengaja menaatkan Tanwir dengan peringatan Sumpah Pemuda. Baginya, substansi energi kolektif untuk negeri telah terpatrit dalam peristiwa 97 tahun silam, ketika kaum muda Indonesia memutuskan untuk berdiri sebagai satu bangsa. Pada saat itu, yang lahir bukan hanya ikrar tiga kalimat, melainkan kesadaran bersama bahwa kemerdekaan adalah tugas yang menuntut persatuan pikiran dan kebe-

ranian tindakan.

### ENERGI KOLEKTIF

Forsyth (2006) memaknai kolektivisme sebagai tradisi, ideologi, atau orientasi pribadi yang menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Dalam kerangka ini, komunikasi dilihat sebagai unit utama realitas sekaligus pemegang standar nilai tertinggi, sehingga identitas dan tindakan seseorang kerap diukur dari kontribusinya bagi kelompok. Hoftede (2005) menambahkan bahwa kolektivisme memiliki sifat bipolar dengan individualisme. Semakin tinggi kecenderungan seseorang atau suatu budaya pada individualisme, semakin rendah derajat kolektivismenya. Relasi tarik-menarik ini membentuk spektrum nilai sosial yang memengaruhi cara masyarakat mengambil keputusan, memprioritaskan tujuan, hingga mengelola relasi antaranggota.

Dalam konteks kekinian, Ikatan Mahasiswa Muham-

madiyah (IMM) memerlukan kolektivitas sebagai daya pengikat yang mampu menyatukan energi organisasi. Ada sejumlah alasan yang membuat energi kolektif menjadi kebutuhan mendesak. Pertama, kolektivitas memungkinkan terjaganya keutuhan organisasi. Kesatuan yang terbangun dari semangat kebersamaan itu menjadi modal penting untuk menghimpun daya energi yang besar dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan Ikatan.

Sebaliknya, organisasi yang terjebak dalam riuh internal akan kehilangan produktivitas, sebab energinya habis terkuras oleh konflik yang berlarut dan tak terarah. Kedua, melalui kolektivitas, tercipta kenyamanan dalam berorganisasi. Kenyamanan ini menjadi landasan bagi terlaksananya kegiatan organisasi dengan penuh kegembiraan. Para kader pun dapat berkontribusi dengan hati yang riang dan semangat yang menyenangkan (joyful). Sebaliknya, ketika kenyamanan itu sirna, organisasi akan terjebak dalam suasana yang diliputi kegelisahan, kebingungan, dan ketegangan, sehingga menggerus semangat kebersamaan yang menjadi ruh gerakan.

Ketiga, melalui kolektivitas, kemajuan organisasi dapat ditempuh secara produktif. Sebaliknya, keterbelahan di tubuh Ikatan akan membuat kader kehilangan fokus untuk bergerak maju.

Suasana organisasi pun terancam terperangkap dalam kegelapan perpecahan, terjebak dalam kubangan pertikaian, serta tersandera dendam yang hanya akan menguras energi dan melelahkan semua pihak.

Bagaimana persatuan itu diwujudkan? Kuncinya terletak pada upaya menghilangkan kebencian, sikap destruktif, serta kepentingan pribadi yang berlebihan. Seluruh elemen di dalam Ikatan sepatutnya menela-dani rumpun bambu: dapat bergesekan, namun tetap tegak dan padu.

Keragaman pikiran dan sikap adalah hal yang lumrah. Namun, perbedaan itu tidak boleh menjadi sumber kerusakan, melainkan harus dikelola secara produktif. Kader yang berada dalam struktur kepemimpinan tidak seharusnya menghindari dari konflik atau lari dari persoalan. Sebaliknya, mereka dituntut untuk mengelola perbedaan dan memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi organisasi.

### MEMBANGUN NEGERI

Dalam cakupan yang lebih luas, semangat kolektivitas di tubuh IMM diarahkan bukan semata untuk memperkuat internal organisasi, tetapi juga untuk merespons tantangan kebangsaan sekaligus mengambil peran aktif dalam merancang masa depan negeri. Realitas hari ini menunjukkan, situasi

PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana. DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara. PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwan.

REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. STAF REDAKSI: Irwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Rahmat Kurniawan, Jane Lestari Parabak, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Jane Lestari Parabak

LITBANG: A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugraha. BIRO DONGGALA: Wahid Agus. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: Subianto. BIRO MOROWALI: Intan. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam.

BIRO BANGKEP: Pariansan Tambunan (Kepala Biro) Rizal Saenong (Pemasaran). BIRO BANGGAI: Pariansan T. Warda L. DESIGN & ARTISTIK: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. KEUANGAN: Febrianti.

EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk.

ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36 TLP: 0451 4012 445 ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.

TRIMEDIA GROUP

### PENERBIT:

PT. Trimedia Sulteng Mandiri  
No. Rek. Bank Sulteng, An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri  
Acc. 001010770011, Rekening No. 728273443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri  
Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6  
An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI  
PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan  
(Ahmad Avenus Toana, Sudarsono, Syafiq, Agung Ramadhan)  
PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP  
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

WARTAWAN HARIAN  
SULTENG RAYA,  
DIBEKALI KARTU  
PERS/SURAT TUGAS  
DAN NAMANYA  
TERCANTUM DALAM  
BOX REDAKSI

**Laptop untuk siswa Sekolah Rakyat**

Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat guna membantu pembelajaran. Penyaluran dilakukan pada Agustus-September 2025.

**Jumlah laptop**  
Data Kemensos, 9 Agustus 2025  
**Total 15.370 laptop**  
Anggaran pengadaan laptop Rp104 miliar

**9.705 siswa**  
Tahap I (akhir Agustus 2025)

**5.665 siswa**  
Tahap II (September 2025)

**Spesifikasi laptop**

SD	SMP	SMA
Prosesor Intel Core i3	Prosesor Intel Core i5	Prosesor Intel Core i5
Layar 14 inci	Layar 14 inci	Layar 14 inci

**Manfaat laptop**

- Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis digital.
- Memberi kesempatan siswa di daerah terpencil untuk mendapatkan materi yang sama seperti di kota besar.
- Memperkuat keterampilan digital siswa dan membiasakan siswa menggunakan perangkat digital.

**Jumlah Sekolah Rakyat**  
Total 67  
Data Kemensos, per 9 Agustus 2025  
Target hingga awal September 2025: 159 sekolah

**Fasilitas pendukung Sekolah Rakyat**

- Penyediaan beragam sekolah siswa.
- Jaminan kesehatan gratis.
- Laboratorium komputer dan IPA.
- Ruang kelas dengan papan pintar (smart board).

Masing-masing siswa mendapatkan laptop sebagai media pembelajaran. Pengadaan harus transparan, terbuka, tidak ada kongkalikong. Tidak boleh ada penyimpangan.

Saifulah Yusuf  
Mensos

DATA BERSEKUTU | FOTO: ANTARA/STAFF ANTARA | ILLUSTRASI: ANTARA/STAFF ANTARA | EDITOR: ANTARA



GUBERNUR Papua Pegunungan John Tabo saat memberikan arahan pada pembukaan rapat koordinasi penyelenggaraan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wamena, Jumat (8/8/2025). FOTO: ANTARA/YUDHI EFENDI

# Presiden Prabowo Bantu 2.200 Rumah Bagi Provinsi Papua Pegunungan

Wamena, (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto membantu 2.200 unit rumah bagi Provinsi Papua Pegunungan guna memenuhi standar hidup sehat dan bersih bagi masyarakat di delapan kabupaten di wilayah itu. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena, Jumat, mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian begitu besar terhadap daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua khususnya Provinsi Papua Pegunungan. "Bapak Presiden memberikan perhatian cukup besar dengan pembangunan rumah layak huni sebanyak 2.200 unit bagi Provinsi Papua Pegunungan," katanya. Menurut dia, bantuan 2.200 unit rumah merupakan kebijakan langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada Provinsi Papua Pegunungan. "Kami mau katakan bahwa bantuan 2.200 unit rumah bukan merupakan usulan reguler bapak bupati di delapan kabupaten lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, tetapi ini betul-betul pemberian langsung Bapak Presiden," ujarnya. Dia menjelaskan sementara usulan pembangunan yang dilakukan oleh Bu-

■ Baca **PRESIDEN**... Hal. 7

## PCO: Kopdes Merah Putih Jembatan Desa Menuju Kemerdekaan Ekonomi

Jakarta, (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan jembatan bagi desa menuju kemerdekaan di bidang ekonomi.



TENAGA Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati dalam siaran atau podcast dengan ANTARA di Jakarta, Jumat sore (11/7/2025). FOTO: ANTARA/PRISCA TRIFERNA

Program tersebut merupakan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

"Kopdes Merah Putih menjadi langkah monumental yang menandai era baru dalam pembangunan nasional berbasis desa. Melalui kedaulatan rakyat dalam mengelola sumber daya mereka sendiri," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu.

Pada momentum peringatan HUT Ke-80 Re-

publik Indonesia (RI), kata Adita, Kopdes Merah Putih bisa diharapkan sebagai sebuah era baru menuju kemerdekaan di bidang ekonomi. "Melalui koperasi ini, masyarakat desa diharapkan bisa semakin berdaya. Kopdes Merah Putih membuat masyarakat desa menikmati kemerdekaan

di bidang ekonomi," kata Adita.

Dia mengatakan Kopdes Merah Putih juga menjadi jembatan transisi dari ketergantungan bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

■ Baca **KOPDES**... Hal. 7

## Karakteristik Daerah Kepulauan Tak Halangi MBG di Kepri

Tanjungpinang, (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan karakteristik daerah kepulauan tidak menjadi penghalang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi tersebut.

Ia berkomitmen Pemprov Kepri mengawal implementasi Program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto di seluruh wilayah itu, termasuk daerah-daerah pulau terluar seperti di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas.



GUBERNUR Kepri Ansar Ahmad diwawancarai di Tanjungpinang, Selasa (12/8/2025). FOTO: ANTARA/OGEN

### ARTIKEL

## Lapas Palu Panen 450 Kilogram Jagung Manis Dukung Ketahanan Pangan

Palu, (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palu, Sulawesi Tengah, melakukan panen perdana 450 kilogram jagung manis dari lahan 510 meter persegi yang dikelola bersama warga binaan sebagai bagian dari pembinaan berbasis keterampilan.

Kepala Lapas Palu Makmur di Palu, Selasa, mengatakan bahwa panen jagung manis di area perkebunan samping lapas dan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Langaleso ini merupakan tonggak awal bagi Lapas Palu dalam mengembangkan sektor pertanian.

"Ini baru langkah awal. Ke depan, kami mencoba komoditas lain yang bernilai

ekonomis tinggi. Prinsipnya, setiap jengkal lahan yang ada harus produktif, sehingga program pembinaan benar-benar memberikan dampak," katanya.

Ia mengatakan program ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan internal lapas, tetapi juga memberi kontribusi nyata terhadap kemandirian pangan daerah.

Dengan demikian, kata dia, pembinaan warga binaan memiliki dampak langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat swasembada pangan nasional.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas)



KEPALA Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Maulana Luthfianto dan jajaran Lapas Palu melakukan panen perdana jagung. FOTO: ANTARA/KANWIL DJITJENPAS SULTENG

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulteng Maulana Luthfianto menyebut panen ini menjadi bukti nyata pembinaan di lapas tak hanya fokus pada pembinaan moral, tetapi juga keterampilan produktif.

"Panen ini menunjukkan bahwa pembinaan di lapas mampu membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat, membuat mereka berdaya, dan ikut mendukung program ketahanan pangan. Ke depan, kami ingin memperluas lahan dan jenis komoditas yang ditanam, agar manfaatnya semakin besar," ujar Maulana.

Ia mengatakan program ini juga sejalan dengan Astacita

Presiden serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan daerah serta memperkuat swasembada pangan nasional.

Maulana juga menambahkan, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama antara petugas lapas dan warga binaan yang disiplin merawat tanaman sejak proses penanaman hingga panen.

Menurut dia, pembinaan berbasis keterampilan ini mendapat respons positif dari warga binaan. Oleh karena itu, ia mengharapkan keterampilan yang diperoleh bisa menjadi bekal usaha setelah mereka kembali ke masyarakat. \*\*\*

# “Cuti Kasih Sayang” IMIP Siapkan 2.000 Bantuan Pendidikan

SULTENG RAYA - PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) meluncurkan program “Cuti Kasih Sayang”, sebagai salah satu bentuk realisasi dari komitmen meningkatkan sektor pendidikan secara menyeluruh dalam berbagai aspek.

Inisiatif sosial tersebut dilakukan dengan mengajak karyawan menjadi relawan untuk berkontribusi langsung pada anak-anak kurang mampu. Program tersebut diinisiasi Yayasan IMIP Peduli (YIP). Dengan keyakinan bahwa langkah kecil itu dapat membawa perubahan besar, IMIP percaya, setiap anak bangsa berhak meraih masa depan cerah dengan dukungan berbagai pihak.

SPV YIP, Widi Subekti, mengungkapkan, program ini resmi diluncurkan sejak 28 Juli 2025 lalu di Panti Asuhan Lami Lu, Yayasan Nurul Ummah dan berhasil

menjangkau 210 anak. Selama satu tahun ke depan, pihaknya menargetkan penyaluran bantuan pada 2.000 anak melalui 1.000 relawan di Sulawesi Tengah.

Bantuan perlengkapan sekolah dan pengumpulan “Kartu Harapan” yang diproyeksi dapat menjadi bantuan pendidikan nantinya, program ini bertujuan tidak hanya memberikan materi, tapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan optimisme anak. IMIP juga memberikan perhatian lebih dalam proses tumbuh kembang mereka, sehingga secara fisik dan mental siap menyongsong masa depan. Terlebih, anak-anak yang belum beruntung secara sosial dan ekonomi, memang perlu mendapat perhatian, dihargai dan lebih percaya diri.

“Jadi, bentuk kegiatan Cuti Kasih Sayang ini dengan memberikan bantuan

pendidikan berupa paket perlengkapan sekolah seperti tas, buku, alat tulis dan kebutuhan lainnya. Kemudian anak-anak penerima manfaat juga akan diberikan kartu harapan untuk diisi. Harapan-harapan apa yang ingin disampaikan kepada IMIP. Setelah melalui proses penilaian dan seleksi, maka beberapa kartu harapan akan diwujudkan melalui pemberian bantuan pendidikan,” jelas Widi Subekti, Rabu (13/08/2025).

Ia menyampaikan, karyawan yang akan menjalani family visit atau cuti dan berminat menjadi relawan program tersebut, dapat mendaftarkan diri dan merekomendasikan dua nama anak yang akan mendapatkan manfaat, di lokasi tempat cuti masing-masing. Untuk tahun ini, lokasi pertama direalisasikan di Provinsi Sulawesi Tengah. “Setelah proses adminis-

trasi selesai, maka relawan akan membawa dua paket bingkisan untuk dibawa dan diserahkan kepada penerima manfaat yang direkomendasikan,” sambung Widi Subekti. Kegiatan tersebut berlangsung setiap bulan dan diadagakan berjalan setahun ke depan.

Widi Subekti mengatakan, pelaksanaan program ini akan terus dimonitor dan dievaluasi. Setelah dikaji, bila efektif dan positif, maka dilanjutkan ke tahun berikutnya.

“Dengan bantuan sederhana ini, kami berharap dapat memberi manfaat pada anak-anak bangsa yang membutuhkan. Semoga perhatian dan dukungan yang diberikan IMIP ini mampu membuat mereka lebih siap menyongsong masa depan lebih baik, menumbuhkan rasa percaya diri dan optimisme,” harap Widi Subekti. \*WAN



PROGRAM “Cuti Kasih Sayang”, PT IMIP untuk sektor pendidikan. FOTO: IST

OPTIMIS dari Halaman.....1

“Salah satu pintu memajukan Sulawesi Tengah dengan membuka gerbang udara,” sambungnya agar status bandara internasional berdampak bagi konektivitas dan geliat ekonomi Sulteng.

Di bagian lain, Gubernur Anwar Hafid mengabarkan bahwa Gubernur Sulbar Suhardi Duka siap mengalihkan calon jamaah haji dari wilayahnya ke Sulteng jika permohonan menjadikan Bandara Internasional Mutiara SIS Aljufri sebagai embarkasi haji dikabulkan. Jarak yang lebih dekat ke Palu daripada di Makassar kata Gubernur Anwar adalah salah satu pertimbangan yang diambil agar memudahkan perjalanan spiritual ke Tanah Suci bagi ribuan calon jamaah dari

dua daerah bertangga ini. “Gubernur Sulawesi Barat sangat mendukung Bandara Internasional Mutiara SIS Aljufri menjadi embarkasi haji,” ujarnya setelah berkomunikasi telepon dengan Gubernur Sulbar.

Sementara itu, agar lompatan baru dalam sejarah penyelenggaraan haji Sulteng ini terwujud, maka Kanwil Kemenag Sulteng menyebutkan 3 syarat yang jadi penilaian Kemenag untuk menetapkan bandara embarkasi haji yakni quota, fasilitas bandara dan daya tampung asrama haji.

Dari segi quota, bandara embarkasi haji harus mampu melayani minimal 4.000 jamaah haji. Terkait itu, pihak kanwil menerangkan bahwa quota haji Sulteng saat ini, seban-

yang 2.000 dan jika digabung dengan quota Sulbar sebanyak 1453 ternyata belum mencapai jumlah minimal. Untuk itu, Sulteng harus mencari tambahan calon jamaah haji dari provinsi lain seperti Gorontalo dan Sultul agar syarat quota terpenuhi.

Dari segi fasilitas bandara sendiri, misalnya dengan penambahan panjang landasan pacu hingga 3000 meter agar memenuhi standar bandara internasional. diyakini akan memperbesar peluang Mutiara SIS Aljufri direstui menjadi bandara embarkasi haji.

Sementara poin terakhir menyangkut kapasitas asrama haji, disebutkan bahwa saat ini Asrama Haji Palu memiliki sekitar 450 tempat tidur dan diharapkan agar jumlah ini dapat ditingkatkan dua kali lipat untuk me-

enuhi kebutuhan kloter.

Alternatif lain, dengan memanfaatkan asrama diklat di BPSDM Provinsi yang jumlah tempat tidurnya mendekati kapasitas Asrama Haji Palu.

Atas penyampaian kanwil, Gubernur Anwar Hafid berharap agar segala sesuatunya segera diinventarisir dan dikoordinasikan dengan baik ke instansi terkait.

“Tidak ada lagi kata menunggu,” tegasnya memberikan instruksi.

Rapat dihadiri Wawali Palu Imelda Liliana Muhiadin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M, Kadis Perhubungan Sumarno, S.E., M.A.P, Kepala Bandara Internasional Mutiara SIS Aljufri Prasetyohadi, PT IMIP dan instansi terkait. \*WAN

PERTAMINA dari Halaman.....1

“Kami ingin memaknai Hari Kemerdekaan ke-80 RI dengan aksi nyata, bukan sekadar seremoni. Donor darah adalah bentuk solidaritas yang langsung memberi manfaat dan bisa menyelamatkan nyawa. Ini sejalan dengan semangat Pertamina untuk terus hadir dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Fanda.

Dukungan juga datang dari tim medis Pertamina di wilayah Sulawesi. Area Manager Medical Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Sitti Maswaeni, menegaskan bahwa kegiatan

ini merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan kerja, sekaligus kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Kami memastikan seluruh proses donor darah berjalan aman dan sesuai standar medis. Selain bermanfaat bagi penerima, donor darah juga baik untuk kesehatan pendonor. Semangat ini kami bawa untuk terus mendorong gaya hidup sehat di lingkungan kerja Pertamina,” jelas Sitti.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Tengku Muham-

mad Rum, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan menjadi mitra sosial yang aktif.

“Melalui Blood Donation Week, kami ingin menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya fokus pada distribusi energi, tetapi juga aktif dalam gerakan sosial yang berdampak langsung. Kami mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama,” ungkap Rum.

Selain diikuti oleh pekerja,

kegiatan ini juga terbuka untuk masyarakat umum di sekitar wilayah operasional. Melalui kegiatan ini, Pertamina menargetkan terkumpulnya ratusan kantong darah yang akan disalurkan kepada PMI untuk kebutuhan medis di wilayah Sulawesi.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk PMI dan pemerintah daerah. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan pentingnya sinergi dalam upaya kemanusiaan dan pemenuhan kebutuhan darah yang masih menjadi tantangan di banyak daerah. \*WAN

SULTENG dari Halaman.....1

Ia menjelaskan bahwa masuk dalam kawasan Wallacea, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki berbagai macam keunikan flora dan fauna serta spesies endemik sebagai kekayaan alamnya. Kekayaan alam ini, kata dia, tentunya memberikan potensi besar bagi Sulawesi Tengah untuk mengembangkan keragaman hayati yang ada di wilayah tersebut.

Oleh karena melihat peluang tersebut, lanjut dia, pihaknya mengupayakan

pembangunan Kebun Raya Sulawesi Tengah sebagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati sekaligus mendukung program pembangunan daerah “Sulawesi Tengah Nambaso” melalui visi Berani Harmoni.

Ia mengatakan, Gubernur Sulteng telah memberikan arahan tertulis agar Breda meninjau kelayakan kawasan Hutan Kota di Kota Palu sebagai lokasi potensial kebun raya, melakukan riset secara komprehensif, dan melibatkan instansi teknis

dalam proses perencanaan.

“Gubernur telah menginstruksikan Breda Sulteng untuk melakukan riset secara komprehensif, serta melibatkan instansi teknis dalam pembentukan kebun raya tersebut,” ujarnya.

Menurut Hasim, kebun raya akan menjadi kawasan konservasi tumbuhan ex situ yang terdokumentasi, serta memiliki peran strategis dalam pelestarian keanekaragaman hayati, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.

Ia melanjutkan bahwa sebagai langkah awal, Breda Sulteng akan menyiapkan dokumen kajian usulan, dokumen kajian lokasi, dan dokumen rencana induk pembangunan Kebun Raya Sulawesi Tengah.

Ia berharap kehadiran kebun raya dapat memperkuat peran Sulawesi Tengah dalam menjaga kekayaan alam sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penelitian dan pengembangan wisata alam. ANT

BRWA dari Halaman.....1

identitas budaya serta hak masyarakat tradisional.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat adat sebagai subjek hukum,” katanya menegaskan.

Selain itu, pengakuan tersebut juga didukung oleh kebijakan sektoral seperti Pasal 63 UU Nomor 32/2009 dan Permen LHK Nomor 347/2019 yang mengakui

kearifan lokal sebagai warisan budaya untuk pengelolaan lingkungan.

Dia menjelaskan data BRWA Sulteng, dari 13 kabupaten dan kota, hingga kini baru ada empat kabupaten memiliki Perda terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yakni Perda Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana. Perda Kabupaten Sigi Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sigi.

Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana, dan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Joisman mengatakan, mi-

nimnya jumlah perda saat ini menunjukkan tantangan besar dalam mendapatkan pengakuan pemerintah daerah, sementara konflik tenurial dan penyingkiran hak masyarakat adat tetap tinggi akibat ketiadaan regulasi yang jelas.

“Peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia juga menjadi ajakan memperkuat komitmen perlindungan hak masyarakat adat dari berbagai ancaman kebijakan,” harapnya. ANT

PEMKAB dari Halaman.....1

di Rumah Sakit Tora Belo.

“Jadi jangan hanya melihat kekurangan di Rumah Sakit Tora Belo ini karena ada kelebihan dari pada rumah sakit yang ada di Kota Palu yakni di Tora Belo sudah memiliki ruangan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) atau ruang perawatan intensif khusus diperuntukkan bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan khusus,” katanya.

Rizal memastikan terus meningkatkan pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di Kabupaten Sigi.

Ia menjelaskan pentingnya masyarakat menge-

lahui dan menaati seluruh prosedur yang ada di rumah sakit, khususnya ruangan IGD.

“Pemerintah daerah segera perbaiki seluruh kekurangan itu,” katanya.

Pihaknya juga segera melakukan pergantian dan rotasi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sigi.

“Pergantian atau mutasi pada lembaga pemerintahan itu merupakan persoalan biasa dan bentuk evaluasi serta kinerja,

termasuk direktur Rumah Sakit Tora Belo itu menjadi kewajiban saya selaku kepala daerah untuk me-

lakukan evaluasi kinerja,” ujarnya.

Ia menyebutkan rencana pergantian dan mutasi itu pada Agustus 2025.

Seorang warga Dolo berinisial AMR datang ke IGD Rumah Sakit Tora Belo pada Minggu (3/8), pukul 02.30 Wita dalam kondisi nyeri perut.

Saat itu, kondisi IGD dengan sembilan tempat tidur terisi, ruang anak terisi dua tempat tidur, dan brankar terisi empat pasien, dengan total 15 pasien.

Pasien itu sudah disarankan untuk menuju rumah sakit di Kota Palu agar segera mendapatkan perawatan intensif. ANT

MENYAPA NUSANTARA

PRESIDEN dari Halaman.....6

pati-Wakil Bupati delapan kabupaten di Papua Pegunungan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terulash dilakukan.

“Pemberian bantuan 2.200 unit rumah adalah instruksi Presiden dan proses pembangunannya lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kami harap usulan bupati delapan kabupaten supaya terus dilakukan sehingga ada penambahan

pembangunan dari 2.200 unit rumah yang diberikan tersebut,” katanya.

Dia menambahkan bantuan 2.200 unit rumah yang diberikan tersebut kepada masyarakat di delapan kabupaten di antaranya Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo, Mamberamo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang dan Yahukimo.

“Pembangunannya adalah 2.000 unit rumah bagi masyarakat dengan tipe

45, sementara 200 unit rumah dikhususkan bagi kepala suku di delapan kabupaten. Kami akan bagi berdasarkan jumlah penduduk di delapan kabupaten,” ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pemprov Papua Pegunungan telah menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan. \*\*\*

KAREKTERISTIK dari Halaman.....6

“Kami pastikan program ini berjalan baik dan tepat sasaran, sehingga anak-anak Kepri mendapatkan asupan gizi yang cukup demi masa depan yang lebih sehat dan cerdas,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa.

Ansar menyampaikan bahwa sejauh ini penerima manfaat MBG di daerah dengan letak geografis 96 persen laut itu, sudah mencapai 516.149 orang yang tersebar di 3.354 sekolah di tujuh kabupaten/kota setempat.

Sebanyak 253 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pendukung MBG disiapkan untuk mendukung program

ini, dan sudah ada 91 SPPG yang beroperasi di Kepri.

Selain anak sekolah, kata Ansar, Program MBG juga menasar kelompok ibu hamil dan ibu menyusui. Terdapat 10.834 ibu hamil dan 9.474 ibu menyusui yang menjadi penerima manfaat MBG di seluruh Kepri.

Ia mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG di Kepri, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga pihak sekolah.

“Program ini tidak hanya tentang makanan, tetapi juga upaya membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan kuat,”

ucapnya.

Ansar mengharapkan Program MBG dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Program ini, menurut dia, berpotensi meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, dan nelayan melalui rantai pasokan makanan bergizi.

“MBG ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan konsumsi dan investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” kata Ansar. \*\*\*

KOPDES dari Halaman.....6

Saat ini, kata Adita, desa dan kelurahan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Misal, sebanyak 90 persen hasil tangkapan ikan belum bisa disimpan dengan layak.

Data lain, sebanyak lima juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih terjerat rentenir, serta lebih dari 50 ribu desa dan kelurahan belum memiliki fasilitas kesehatan. Selain itu, sebanyak 70 persen desa dan kelurahan belum tersentuh koperasi.

Terdapat 60 persen koperasi yang belum memiliki layanan farmasi dan lebih dari 31 ribu koperasi belum ada toko sembako, serta lebih dari 50 persen desa belum memiliki toko sarana produksi untuk mendukung pertanian dan

usaha lokal.

Presiden Prabowo Subianto lantas membentuk 80.081 Kopes Merah Putih pada 21 Juli 2025. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis membangun ekonomi kerakyatan yang berdikari, inklusif, dan adil.

Program ini merupakan pelaksanaan dari Astacita ke-3, yang menempatkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa. Tujuannya yakni untuk membuka lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat sentra produksi rakyat secara berkelanjutan.

“Lebih dari 80 ribu koperasi ini adalah upaya konkret untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan penting bagi rakyat. Kita hadirkan sembako, obat, pupuk langsung ke tangan masyarakat. Dengan harga

yang terjangkau dan sistem yang adil,” kata Presiden Prabowo.

Ketua Kopes Merah Putih Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Dedi Nurendi mengatakan koperasi ini membantu meringankan beban masyarakat Cileunyi Wetan.

“Kopdes ini menjawab keresahan masyarakat yang harus membeli kebutuhan pokok agak jauh. Masyarakat dalam hal simpan pinjam juga banyak yang terilit Bank Emok (bank keliling),” kata Dedi.

Dedi mengatakan Kopes Merah Putih merupakan jawaban atas kebutuhan ekonomi masyarakat. “Mari berkolaborasi karena ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Koperasi juga menanamkan gotongroyong,” ucap dia. \*\*\*

## Mahasiswa Nilai Kemerdekaan Belum Sepenuhnya Dirasa Rakyat



Arif



Rima Asmajita

**SULTENG RAYA** -Memasuki usia kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-80 tahun, sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu menilai bahwa kemerdekaan sejati belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam pemerataan kesejahteraan dan kebebasan berkehidupan bagi seluruh rakyat.

Arif, mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam, menuturkan bahwa kemerdekaan tidak sebatas terbebas dari penjajahan asing, melainkan juga kebebasan untuk melakukan sesuatu selama tidak merugikan orang lain. Menurutnya, kemerdekaan fisik memang telah diraih sejak Indonesia lepas dari penjajah Jepang dan Belanda, namun masih banyak rakyat yang merasakan penjajahan dalam bentuk lain dari bangsanya sendiri.

"Kalau soal dijajah bangsa lain kita sudah merdeka. Tapi kalau dijajah bangsa sendiri, kita belum merdeka. Di Indonesia ini hanya kata merdeka saja yang terasa, tapi arti sebenarnya belum merata dirasakan masyarakat. Masih banyak orang di pelosok yang belum merasakan fasilitas dan kesejahteraan seperti di kota," ujarnya, Rabu (13/8/2025).

la menambahkan, ketimpangan tersebut membuat sebagian masyarakat merasa tidak mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Meski demikian, ia tetap percaya bahwa pemerintah dapat memperbaiki keadaan. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara rakyat dan pemerintah.

"Kalau pemerintah agak salah jalan, ya sama-sama kita perbaiki. Kita sesama manusia tidak luput dari kesalahan. Kalau pemerintah lupa kita ingatkan lewat diskusi, kalau diskusi tidak membuahkan hasil, baru kita aksi atau demo," tambahnya.

Arif juga mencontohkan salah satu pejabat daerah

yang menurutnya membawa dampak positif, yakni Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. "Beliau banyak memerdekakan orang lain melalui program-programnya, seperti program Berani Cerdas, yang sudah mulai memerdekakan anak-anak di provinsi ini," ucapnya.

Sementara itu pandangan serupa datang dari Rima Asmajita, seorang mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI). Rima memandang kemerdekaan sebagai kondisi ketika seseorang dapat hidup dengan tenang, tanpa rasa takut dan memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya.

"Buat saya merdeka itu bisa sekolah dan bekerja dengan tenang, bisa berpendapat tanpa takut, dan tidak terkekang oleh keadaan. Merdeka berarti kita punya pilihan dan kesempatan yang sama," ungkapnya.

Namun, Rima mengaku perasaan merdeka itu tidak selalu ia rasakan. "Kadang saya merasa sudah merdeka kadang belum. Secara negara, iya kita sudah merdeka tapi dari segi ekonomi dan kehidupan sehari-hari, masih banyak tekanan. Masih harus memikirkan makan besok, biaya sekolah, dan harga kebutuhan yang terus naik," katanya.

Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih pada rakyat kecil, tidak hanya memusatkan pembangunan di kota besar. "Pemerintah seharusnya juga fokus membangun desa menciptakan lapangan kerja, dan membantu modal usaha kecil agar ekonomi masyarakat terbantu," tambahnya.

Pandangan kedua mahasiswa ini menggambarkan bahwa kemerdekaan bagi sebagian rakyat Indonesia masih menjadi cita-cita yang belum sepenuhnya terwujud, khususnya dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. MG3/MG4/MG5

## TK Pembina Gelar Parade Merah Putih

**SULTENG RAYA**- Pemerintah Kota Palu diwakili Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palu Usman menghadiri kegiatan Parade Merah Putih yang digagas oleh keluarga besar TK Negeri Pembina Palu, pada Rabu (13/08/2025) di halaman kantor Sekretariat Daerah Kota Palu.

Kegiatan yang diikuti seluruh peserta didik TK Negeri Pembina dan sejumlah TK lainnya ini dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Asisten Usman yang membacakan sambutan tertulis wali kota menyampaikan Parade Merah Putih ini bukan sekadar acara untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan.

Lebih dari itu, kata asisten, ini adalah bentuk pendidikan karakter, menanamkan rasa cinta tanah air sejak usia dini, serta menguatkan nilai-nilai kebangsaan yang kelak akan membentuk anak-anak menjadi pribadi yang berakhlak, tangguh, dan berjiwa Pancasila.

"Hal ini sejalan dengan penguatan delapan profil lulusan, khususnya pada dimensi berkewarganegaraan," kata asisten.

Menurut asisten, sejak usia dini, anak-anak perlu dikenalkan pada simbol-simbol negara, semangat persatuan, dan nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan, agar kelak mereka tumbuh menjadi warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam moral dan karakter.

"Anak-anakku yang saya cintai, hari ini kalian berjalan dengan bangga membawa Merah Putih. Itu artinya kalian sedang menunjukkan bahwa kalian cinta In-



SISWA siswi TK Pembina semarak mengikuti parade merah Putih. Di halaman sekretariat Daerah Kota Palu, Rabu (13/08/2025). FOTO PPD KOMINFO PALU

donesia. Teruslah belajar, rajin beribadah, hormati orang tua dan guru, serta tolong-menolong dengan teman. Itulah cara kita mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata para pahlawan," pesan asisten.

Kepada guru-guru dan orang tua, asisten menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas upaya membimbing

dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini.

Pendidikan karakter memang harus dimulai dari rumah dan diperkuat di sekolah, sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan, tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia.

"Akhir kata, mari kita jadikan momentum HUT ke-80 RI ini sebagai pengingat

bahwa kemerdekaan adalah amanah yang harus kita isi dengan karya dan prestasi. Semoga Parade Merah Putih ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memupuk semangat cinta tanah air," tutupnya.

Kegiatan ini dimeriahkan dengan sejumlah penampilan dari para peserta didik serta pelepasan balon udara berwarna Merah dan Putih. ABS

## Ny. Rahmawati Jabat Ketua DWP Palu



SERAH terima jabatan Ketua DWP Palu disaksikan Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana, di Bantaya Setda Palu. Selasa (12/8/2025). FOTO:IST

**SULTENG RAYA**- Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Palu Periode 2024-2029, yang berlangsung di ruang rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Selasa (12/08/2025).

Serah terima ini dilakukan dari Ketua DWP Kota Palu periode 2019 - 2024, Novayanti Imran kepada Ketua DWP Kota Palu Periode 2024 - 2029, Rahmawati Romy Sandi Agung.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Imelda yang juga selaku Penasehat DWP Kota Palu, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya

kepada Ketua DWP periode sebelumnya beserta seluruh jajaran pengurus yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk memajukan organisasi, membedayakan anggota, serta mendukung program-program Pemerintah Kota Palu.

"Pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan menjadi pondasi kuat bagi keberlanjutan program DWP ke depan," ujar wakil wali kota.

Kepada Ketua DWP Kota Palu yang baru saja menerima amanah, Wakil Wali Kota Imelda mengucapkan selamat bertugas.

Menurut wakil wali kota, jabatan tersebut bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk melanjutkan

dan mengembangkan kiprah DWP dalam meningkatkan peran perempuan, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Dia berharap, kepemimpinan baru dapat menjalin kerja sama harmonis dengan seluruh perangkat daerah,

serta mengembangkan program-program yang relevan dengan tantangan zaman, mulai dari pemberdayaan ekonomi kreatif, peningkatan literasi digital, pencegahan stunting, hingga kepedulian terhadap isu sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pelestarian lingkungan.

Imelda juga menekankan pentingnya peran DWP dalam membina istri-istri pegawai negeri sipil (PNS), termasuk anggota yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Wakil wali kota mendorong adanya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lingkungan DWP.

"Tidak semua istri ASN itu adalah ASN. Ada yang ibu rumah tangga, dan mereka harus dibina agar bisa memiliki kemandirian ekonomi. Misalnya, jika ada anggota yang punya keahlian membuat kue, itu bisa dikembangkan. UMKM yang berjalan baik akan menopang perekonomian keluarga dan mendukung program pemerintah," jelas wakil wali kota.

Wakil wali kota mencontohkan, anggota DWP dapat berkontribusi pada program

Makanan Bergizi Gratis dengan menyiapkan bahan baku yang nantinya bisa masuk ke Koperasi Merah Putih, sehingga DWP tidak hanya berperan dalam menyukseskan program daerah, tetapi juga program pemerintah pusat. Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Imelda mengingatkan agar program DWP tidak hanya berhenti pada kegiatan lomba, tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang nyata bagi kesejahteraan keluarga.

"Dapur itu harus ngebul, perempuan itu inovasinya luar biasa. Kegiatan religius jalan, tapi sisi ekonominya juga harus bergerak. Pemerintah Kota akan terus mendukung program DWP agar berjalan dengan baik," tegas wakil wali kota.

Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota Imelda berpesan agar para anggota DWP tetap menjaga keseimbangan peran di rumah tangga. "Jangan lupa dengan suami di rumah. Jangan sampai terlalu aktif di organisasi, tapi kita lupa dengan suami kita," tutupnya.

Acara Sertijab ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus DWP Kota Palu, serta undangan lainnya. ABS

## Makna Kemerdekaan dalam Perspektif Pemuda

**SULTENG RAYA**- Kemerdekaan bagi setiap individu memiliki makna yang berbeda-beda. Bagi Rahmatia, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, kemerdekaan bukan sekadar kebebasan berpendapat atau bebas dari penjajahan seperti yang umum dipahami, melainkan sebuah kesempatan berharga untuk berkarya, berkontribusi, dan membawa perubahan bagi bangsa.

"Kemerdekaan juga bukan semata warisan yang kita syukuri, tapi sebagai amanah yang harus dijaga dan diperjuangkan," ujar Rahmatia, Rabu (13/8/2025).

Namun, di balik semangat merdeka itu, Rahmatia mengakui bahwa ia sendiri belum merasa sepenuhnya merdeka. Meski memiliki kesempatan belajar dan mengejar cita-cita, muncul rasa takut yang kerap menghantui, terutama ketika melihat beragam kabar dan kebijakan pemerintah yang tersebar di media sosial.

"Kadang saya bingung harus bersikap bagaimana, percaya dengan berita yang ada atau diam saja supaya kepala tidak pusing," ungkapnya.

Kekhawatiran terhadap masa depan generasi juga menjadi beban pikiran Rahmatia, namun dia menegaskan harapannya agar



Rahmatia



Rahman Musa

Indonesia tetap baik-baik saja, sehingga semua warga bisa hidup dan bermimpi tanpa rasa takut.

Di sisi lain, Rahman Musa, selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Datokarama Palu, menyampaikan pandangannya bahwa meski Indonesia sudah merdeka secara konstitusional, mayoritas rakyat belum merasakan kemerdekaan secara penuh.

Ia menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola pemerintahan, khususnya sentralisasi yang mengengkan otonomi daerah. "Pemerintah pusat menjarah hasil bumi di daerah, otonomi dicabut,

dan desentralisasi dihilangkan. Indonesia terlalu luas untuk diatur hanya dari Pulau Jawa. Kembalikan apa yang menjadi hak tiap-tiap daerah," tegas Rahman.

Rahman menambahkan, Indonesia membutuhkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab sesamanya serta penerimaan demokrasi secara penuh agar bangsa ini bisa tetap bertahan.

"Kita hanya bisa berharap agar Indonesia tidak bubar sebelum masyarakat sadar akan tanggung jawab dan menerima demokrasi secara utuh, walaupun harapan itu terkadang bertentangan dengan realita," harapnya. MG1/MG2

## Lomba Paduan Suara 3 Stanza Dimulai



PEMBUKAAN lomba Paduan Suara Lagu Indonesia Raya 3 Stanza dan Lagu Daerah Kaili di Auditorium Setda Palu. Selasa (12/08/2025). FOTO:ANDI BESSE/SR

**SULTENG RAYA**- Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, secara resmi membuka Lomba Paduan Suara Lagu Indonesia Raya 3 Stanza dan Lagu Daerah Kaili Tingkat SD/SMP se-Kota Palu yang digelar di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Selasa (12/08/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kes-

bangpol) Kota Palu, yang diikuti 12 SMP dan 6 SD dari berbagai wilayah di Kota Palu.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Imelda menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Palu, Ansyar Sutiadi, atas inisiatifnya menyelenggarakan ajang ini.

"Ada 12 SMP dan 6 SD yang ikut, sementara kita

memiliki banyak sekolah di Kota Palu. Olehnya, tahun depan harus lebih dari jumlah yang ikut hari ini," ujarnya. Ia juga meyakini para peserta telah mempersiapkan diri dengan baik, bahkan mengusulkan agar penampilan mereka dapat ditampilkan pada momen peringatan Hari Kemerdekaan mendatang.

Menurut wakil wali kota, menghafal lagu Indonesia

Raya dan lagu daerah merupakan kewajiban penting bagi setiap anak bangsa.

Selain menjadi ajang kompetisi, kata Wakil Wali Kota Imelda, lomba ini juga menjadi kesempatan bagi para siswa untuk bersosialisasi dengan teman-teman dari sekolah lain, bertukar pikiran, dan membangun jaringan pertemanan.

Dalam kesempatan tersebut, wakil wali kota juga memberikan pesan motivasi kepada para siswa agar tidak berkecil hati jika tidak diterima di sekolah yang diinginkan.

"Semua sekolah itu favorit. Yang membedakan hanyalah fokus anak-anak dalam meraih masa depan. Jadi, semua sekolah sama," pesan wakil wali kota.

Kepada para peserta, Wakil Wali Kota juga berpesan agar menampilkan performa terbaik dengan menjunjung tinggi sportivitas.

"Menang adalah bonus. Yang terpenting adalah proses belajar, kebersamaan, dan kebanggaan kita sebagai anak bangsa," tutup Imelda. ABS